



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau

RANCANGAN AKHIR **RENJA**

Tahun 2023



Tahun Anggaran 2022

KATA PENGANTAR

Puui syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 telah selesai disusun.

Rencana Kerja disusun untuk memenuhi amanat pada Pasal 15 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja Ini memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagai acuan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pada rencana kerja ini memuat 6 Program, 15 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan serta untuk pelaksanaannya memerlukan dana sebesar Rp. **22.067.028.566,-** (*Dua puluh dua miliar enam puluh tujuh juta dua puluh delapan lima ratus enam puluh enam rupiah*).

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690329 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	17
2.3. Isu-isu strategis	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	44
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V. PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	28
Tabel.2.3.Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2023 RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	34
Tabel.2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	44
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BKPM Tahun 2020-2024	47
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	50
Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

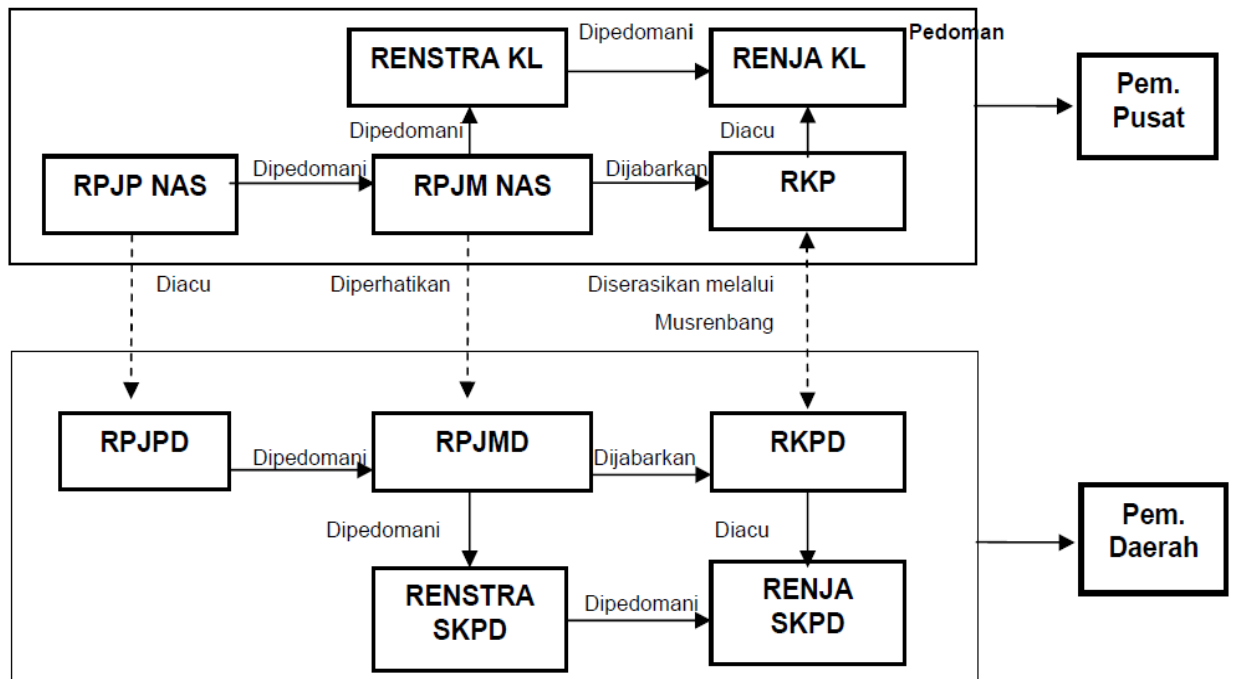
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan, target keluaran sub kegiatan, total dana yang diperlukan sub kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

**KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L
DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**



1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
 12. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025;
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784)

24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 817);
25. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau pada urusan penanaman modal. Adapun Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021- 2026.
- b. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;

- d. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- e. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Kegiatan *review* hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2021 (tahun n-2) ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra DPMPTSP serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output DPMPTSP tahun 2021. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, pelaksanaannya, dan hasil.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaan;

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai data awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; dan

- c. Kondisi Pandemi Covid-19 yang membuat terhambat serta menurunnya realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada Tahun 2021 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bersama OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di perintahkan untuk melakukan perubahan nomenklatur, kodefikasi dan klasifikasi Program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan sebelumnya menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh sebab itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun evaluasi 2021 telah melakukan perubahan tersebut dan juga telah mengevaluasi pelaksanaan Renja pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan, sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%			100%		
2	18	01	1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>		
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	1		

2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	6 Dokumen					1		
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen					1		
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen					1		
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	100%					100%		
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	84 Bulan					14		
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	72 Bulan					12		
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPSTSP Prov. Kepri	60 Dokumen					1		
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	48 Dokumen					0		
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	100%					100%		
2	18	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72 Bulan					12		
2	18	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	48 Dokumen					0		

2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Pegawai	100%					100%		
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36 Bulan					0		
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	148 Unit					0		
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta	28 Peserta					0		
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPSTSP Prov. Kepri	37 Orang					1		
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	28 Peserta					0		
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					100%		
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	72 Bulan					12		
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Bulan					0		
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	36 Bulan					0		
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	72 Bulan					12		
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan					12		

2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Bulan					12		
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	72 Bulan					12		
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	72 Bulan					12		
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%					100%		
2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit					0		
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	6 Unit					1		
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	10 Unit					2		
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Diadakan								
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	72 Bulan					12		

2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%						100%		
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	72 Bulan						12		
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan						12		
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan						12		
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTT dan THL)	78 Bulan dan 72 Bulan						13 & 12		
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	100%						100%		
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72 Bulan						12		
2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Mebel									
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	72 Bulan						12		

2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	72 Bulan					12		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100%					0%		
						Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	100%				100%			
2	18	02	1.01		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha</i>	<i>6 Dokumen</i>					<i>1 Dokumen</i>		
						<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha</i>	<i>900 Perusahaan</i>				<i>0</i>			
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	6 Dokumen					1		
						Jumlah Peserta Konsultasi Publik	400 Orang				0			
						Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan	100 Orang				100			
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen				0			

						Jumlah Pelaksanaan Pemberian Insentif	3 Dokumen					0			
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	11 Dokumen					2 Dokumen			
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	3 Dokumen					0			
						Jumlah peserta sosialisasi RUPM	60 Orang					30			
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	5 Dokumen					1			
						Jumlah Dokumen Profil Pengembangan Penanaman Modal	4 Dokumen					1			
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	12%					7%			
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	42300 Investor					6000			
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Bahan Promosi	5 Bahan Promosi					1			
						Jumlah Media Publikasi	5 Media					1			
						Jumlah Peserta Pelatihan	180 Peserta					30			
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Bussiness Meeting Yang Diikuti/diselenggarakan	10 Kegiatan					2			
						Jumlah Event Promosi Investasi	11 Event					2			

2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,1 Indeks					83,15 Indeks		
						Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	100%					80%		
2	18	04	1.01		<i>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP</i>	100%					80%		
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	5 Kegiatan					1		
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	5000 Laporan					1000		
2	18	04	1.02		<i>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP</i>	100%					80%		
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	5 Kegiatan					1		
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	3000 Dokumen					600		
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan	5 Dokumen					1		

					terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau	20 Buku					4		
						Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Informasi Layanan	5 Kegiatan					1		
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	5 Dokumen					1		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100%					100%		
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100%					100%		
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan	240 Perusahaan					40		
						Taskforce & Asistensi Pengendalian Penanaman Modal	135 Perusahaan					25		
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Frekuensi Rapat Koordinasi Penanaman Modal	5 Kali					1		
						Jumlah dokumen informasi kemitraan antara Perusahaan dengan UMKM	5 Dokumen					1		
						Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Bimbingan Penanaman Modal	140 Perusahaan					30		

						Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi Yang Dilaksanakan	150 Orang					30		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup : (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (2) Promosi Penanaman Modal, (3) Pelayanan Penanaman Modal, (4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan (5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kinerja penanaman modal terutama dilihat dari nilai realisasi investasi. Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh perusahaan. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Komitmen DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau beserta instansi terkait terhadap pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal menjadi Kunci utama peningkatan Realisasi Investasi. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perusahaan perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan kesadaran dari pelaku usaha untuk memuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tugas dan fungsinya telah mencapai target bahkan melebihi target Renstra

sebelumnya, pencapaian beberapa indikator dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilaporkan oleh pelaku usaha/investor, dimana indikator tersebut dijalankan sesuai dengan program yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut merupakan hasil dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nilai Realisasi Investasi (PMA) Tahun 2021 yaitu 1.043.720,9 (US\$.Ribu) atau Rp. 15.238.325.140.000,- (*Lima belas triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah*) atau 188,12% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.8.100.000.000.000,- (*Delapan triliun seratus miliar rupiah*), Nilai realisasi investasi (PMA) Tahun 2021. * sumber data BKPM tanggal 31 Desember 2021

Dan untuk capaian target Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 9.768.698.700.000,- (*Sembilan triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) atau 1085,33% dengan 5006 Proyek dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.900.000.000.000,- (*Sembilan ratus miliar rupiah*)

2. Pencapaian jumlah investor dalam negeri yang sangat tinggi ini dikarena penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission.

Untuk indikator jumlah investor dalam negeri dan luar negeri diperoleh berdasarkan penghitungan jumlah izin yang terdaftar di OSS (Online Single Submission) yang berinvestasi di Provinsi Kepri. Ditahun 2018 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, sehingga Sistem Online SPIPISE yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk permohonan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Alih Status, Izin Prinsip Penggabungan dan Izin Prinsip Perubahan ditutup.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri diperoleh dari data Perusahaan Izin Prinsip PMDN (data dari sistem SPIPISE) Tahun 2021 di ganti menjadi data perusahaan yang masuk di dalam sistem OSS melalui aplikasi NSWI. Database NSWI terintegrasi dengan aplikasi Online Single Submission atau OSS, sehingga penarikan atau filterisasi yang dilakukan pada aplikasi tersebut bisa dengan mudah diambil oleh Instansi terkait. OSS sendiri merupakan aplikasi pengganti SPIPISE atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2019 berdasarkan data OSS sebanyak 5393 investor atau 3479% dari target yang di tetapkan yaitu 155 Investor dan Capaian Kinerja Jumlah Investor Luar Negeri sebanyak 580 investor atau 537% dari target yang di tetapkan yaitu 108 Investor.

3. Untuk indikator nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu dan persentase pelayanan sesuai SOP didukung oleh Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang merupakan tolak ukur keberhasilan bagi DPMPTSP Prov. Kepri dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini, terdapat beberapa unsur dalam pelayanan yang harus ditingkatkan yaitu: Kesopanan, Keramahan, dan Kedisiplinan Petugas, Biaya Pelayanan dan Produk/Hasil Layanan. Realisasi kinerja program yang tidak memenuhi target kinerja hasil. Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (100 kuesioner) yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar 81,53 yang menunjukkan mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25.

Ada 1 yaitu Program Peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dengan 1 (satu Indikator) yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PTSP, selebihnya Indikator indikator program dapat memenuhi target
Penjelasan terkait pencapaian kinerja perangkat daerah tergambar dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Satuan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha			0	0	95	100	100	100	0				%
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi			n/a	100	100	100	100	100	n/a				%
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal			5	7	8	10	11	12	4.5				%
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP			70	80	90	100	100	100	94				%
5	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM			100	100	100	100	100	100	100				%
6	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau			100	100	100	100	100	100	100				%

2.3 Isu-isu Strategis Tahun 2021

Dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu di Tahun 2021, perlu adanya program dan kegiatan yang memperhatikan perubahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis antara lain dengan pelaksanaan dan berlakunya komitmen pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan global, Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing secara nasional, pelayanan Perizinan dan peningkatan peluang penanaman modal. Demikian pula dalam pelayanan di daerah perlu memperhatikan dan kebutuhan dari kalangan dunia usaha/ dunia industri dan masyarakat pada umumnya.

1. Peluang (*Opportunities*) :

- a. Kebijakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi peluang meningkatkan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau, terutama terkait dengan meningkatnya basis produksi, industri dan perdagangan yang terpadu.
- b. Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis berada di selat Malaka dan laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Negara Singapura dan Malaysia. Sehingga mempermudah akses ke pusat-pusat bisnis, industri manufaktur dan jasa-jasa keuangan internasional di Kawasan Asia Tenggara.
- c. Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Karimun dan Bintan (Free Trade Zone) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

- d. Kekayaan potensi sumber daya alam dan potensi bahan tambang yang dapat menjadi andalan dan daya tarik bagi penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan setengah terampil dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal dan pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa penunjang perindustrian.
- f. Adanya pemberian insentif fiskal, kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI).
- g. Kebijakan peningkatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025 dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berbasis teknologi informatika.
- h. Kebijakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk di wilayah di Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan daya saing daerah dan menjadi daya tarik investasi di daerah.

2. Tantangan (*Threats*) :

- a. Adanya kesenjangan pembangunan dan perkembangan sarana dan prasarana dasar antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menghambat investasi di daerah.
- b. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan promosi dan pelayanan penanaman modal di daerah.
- c. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam pelayanan perijinan dan non perijinan.
- d. Kondisi Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi serta penghalang minat investor untuk berinvestasi di Kepulauan Riau.

Permasalahan yang timbul berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lain belum tersedianya gedung pusat pelayanan terpadu dan sumberdaya aparatur yang sesuai bidang teknologi informasi terbatas.
2. Jumlah aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu relatif terbatas dalam bidang pelayanan, belum adanya pejabat fungsional tertentu dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi dikabupaten/kota yang akan

dipromosikan kepada investor, terutama tentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Sell) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.

4. Pertumbuhan investasi penanaman modal asing (PMA) lebih banyak terkonsentrasi di 3 wilayah utama yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, yang lebih siap dari infrastruktur fasilitas yang layak maupun akses ke wilayah, sementara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau kurang lengkapnya data dan informasi potensi dan peluang investasi yang siap akan ditawarkan.
5. Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota belum optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan peluang investasi masing – masing kabupaten/kota, melakukan promosi potensi dan peluang investasi. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
7. Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

3. Rumusan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode diskusi intensif dengan seluruh bidang-bidang dan sekretariat Dinas. Hasil rumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19. Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat

- dilaksanakan dengan pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.
- b. Investasi yang belum merata antar wilayah maupun antar sektor, dipengaruhi infrastruktur dan sistem logistik yang belum mendukung, dan belum adanya insentif penanaman modal.
 - c. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
 - d. Promosi dan kerjasama investasi yang belum efektif dipengaruhi oleh ketersediaan data potensi dan peluang investasi yang menyajikan data penunjang investasi yang komprehensif.
 - e. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Pelayanan perijinan perlu diarahkan menuju one day service dengan optimalisasi OSS RBA dan Wilayah Bebas dari Korupsi.
 - f. Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pedoman penyusunan program, kegiatan, dan sub Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ialah terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan telah tertuang dalam RKPD yang juga telah diselaraskan dengan dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 serta telah melalui beberapa tahapan penyusunan termasuk entry pada aplikasi SIPD. Berikut Penjabaran dari Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan di laksanakan DPMPTSP berdasarkan tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel.2.3.Review terhadap Rancangan Akhir Tahun 2023 RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					22.067.028.566						21.360.085.363		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kepulauan Riau dan Luar Kepulauan Riau	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	%	14.476.036.843	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kepulauan Riau dan Luar Kepulauan Riau	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	%	14.488.392.486	
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Tanjungpinang</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	100	%	237.650.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Tanjungpinang</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	100	%	237.650.000	
1.1.i	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	107.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	57.650.000	
1.1.ii	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	70.000.000	

1.I. iii	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	50.000.000	
1.I. iv	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	60.000.000	
1.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	100	%	10.759.135.030	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	100	%	11.270.967.032	
1.II .i	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 / 14	Orang / Bulan	10.236.640.030	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 / 14	Orang / Bulan	10.748.472.032	
1.II .ii	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	492.495.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	492.495.000	
1.II .iii	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	15.000.000	
1.II .iv	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	15.000.000	

1.II I	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	100	%	44.220.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	100	%	44.220.000	
1.II I.i	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	29.220.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	29.220.000	
1.II I.ii	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	Laporan	15.000.000	
1.I V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Disiplin Pegawai	100	%	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Disiplin Pegawai	100	%	200.000.000	
1.I V.i	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	150.000.000	
1.I V.ii	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	50.000.000	
1.V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	481.426.572	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	481.426.572	
1.V .i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	
1.V .ii	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	
1.V .iii	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	80.000.000	

1.V .iv	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.000.000
1.V .v	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	20.000.000
1.V .vi	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	30.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	30.000.000
1.V .vi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kabupaten/Kota dan Luar Kepri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	251.426.572	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kabupaten/Kota dan Luar Kepri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	251.426.572
1.V I	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	1.050.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	700.523.641
1.V I.i	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	600.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	300.000.000
1.V I.ii	Pengadaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	50.000.000
1.V I.iii	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-
1.V I.iv	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	400.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	350.523.641
1.V II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.518.850.241	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.368.850.241
1.V II.i	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	132.948.192	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	132.948.192

1.V II.ii	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	270.554.809	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	120.554.809	
1.V II.iii	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	82.340.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	82.340.000	
1.V II.iv	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.033.007.240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.033.007.240	
1.V III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	100	%	184.755.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjungpinang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	100	%	184.755.000	
1.V III.i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	126.679.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	126.679.000	
1.V III.ii	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	8.076.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	8.076.000	
1.V III.ii i	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	95	%	1.025.924.151	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	95	%	652.058.448	
			Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	100	%								

2.I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	<i>Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha</i>	2	Dokumen	490.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	<i>Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha</i>	2	Dokumen	452.058.448	
			<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha</i>	150	Perusahaan				<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha</i>	150	Perusahaan		
2.I.i	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen	400.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen	200.000.000	
2.I.ii	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	150	Kegiatan Usaha	90.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	150	Kegiatan Usaha	252.058.448	
2.II	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	<i>Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi</i>	3	Dokumen	535.924.151	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	<i>Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi</i>	3	Dokumen	200.000.000	
2.II.i	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	Dokumen	75.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	Dokumen	80.000.000	
2.II.ii	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	2	Dokumen	460.924.151	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	2	Dokumen	120.000.000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8	%	1.698.408.894	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8	%	2.006.333.687	
3.I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	<i>Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri</i>	6500	Investor	1.698.408.894	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	<i>Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri</i>	6500	Investor	2.006.333.687	

3.1.i	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1	Dokumen	300.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1	Dokumen	800.000.000	
3.1.ii	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2	Dokumen	1.398.408.894	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2	Dokumen	1.206.333.687	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84,2	Indeks	3.720.893.638	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84,2	Indeks	3.076.378.320	
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	90	%				Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	90	%		
4.1	<i>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Provinsi Kepulauan Riau</i>	<i>Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP</i>	90	%	870.893.638	<i>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Provinsi Kepulauan Riau</i>	<i>Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP</i>	90	%	776.378.320	
4.1.i	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1000	Pelaku Usaha	450.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1000	Pelaku Usaha	400.000.000	
4.1.ii	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	1000	Kegiatan Usaha	420.893.638	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	1000	Kegiatan Usaha	376.378.320	

4.II	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	90	%	2.850.000.000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	90	%	2.300.000.000	
4.II.i	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	600	Pelaku Usaha	1.000.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	600	Pelaku Usaha	1.100.000.000	
4.II.ii	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	600	Kegiatan Usaha	500.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	600	Kegiatan Usaha	500.000.000	
4.II.iii	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	50	Orang	850.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	50	Orang	500.000.000	
4.II.iv	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	60	Kegiatan Usaha	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	60	Kegiatan Usaha	200.000.000	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	%	716.003.706	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	%	835.972.369	

5.I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	%	716.003.706	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	%	835.972.369	
5.I.i	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	Kegiatan Usaha	196.003.706	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	Kegiatan Usaha	195.972.369	
5.I.ii	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	304	Pelaku Usaha	210.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	304	Pelaku Usaha	425.000.000	
5.I.iii	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	70	Kegiatan Usaha	310.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	70	Kegiatan Usaha	215.000.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	100	%	429.761.334	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	100	%	300.950.053	
6.I	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	12	Bulan	429.761.334	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	12	Bulan	300.950.053	
6.I.i	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	429.761.334	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	300.950.053	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah . Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang di tahun 2022, apabila ada aspirasi masyarakat maka akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Hingga saat ini DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau masih belum menerima usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

**Tabel.2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD			CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang akan dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan Sasaran pembangunan Tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan realisasi penanaman modal;
2. Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;
dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor

Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepastian dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan

5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM tahun 2020- 2024.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BKPM Tahun 2020-2024

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan:</p> <p>1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta</p> <p>Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.</p> <p>Sasaran strategis:</p> <p>1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;</p> <p>2) Meningkatnya kepercayaan</p>	<p>(1) Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19, mencakup pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.</p> <p>(2) Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurundari 82,34 pada tahun 2019 menjadi 81,93 pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan one day service sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan. Selain itu, belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).</p> <p>(3) Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.</p> <p>(4) Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah</p>	<p>1. Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang mengatur tentang pemberian insentif penanaman modal maupun pemberian insentif bagi industri yang terdampak Covid-19.</p> <p>2. Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal</p> <p>3. Kurangnya anggaran untuk penyediaan data potensi dan peluang investasi di masing-masing kabupaten yang komprehensif</p> <p>4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mempersingkat waktu penyelesaian layanan perizinan dan non</p>	<p>1. Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja.</p> <p>2. Penerapan online single submission (OSS) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.</p> <p>3. Peningkatan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP.</p>

<p>pelaku usaha/penanam modal; dan</p> <p>3) Terwujudnya birokrasi yang</p> <p>2) bersih, efektif, dan melayani.</p>	<p>maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan</p> <p>(5) Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumberdaya lokal. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.</p>	<p>perizinan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan layanan online.</p> <p>5. Dukungan infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dalam rangka menunjang peningkatan investasi. Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi covid-19.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menyusun Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas promosi dan penyiapan bahan promosi (Investment Project Ready To Offer / proyek investasi Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal yang siap ditawarkan)
2. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang

efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking).
5. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.
6. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik menuju one day service melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS, serta penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
			Tahun 2023	
Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru		Nilai Realisasi Investasi PMA	23.000	Milyar rupiah
		Nilai Realisasi Investasi PMDN	13.500	Milyar rupiah
	Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	a. Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	95	%
		b. Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8%	%
		c. Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84,2	nilai
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	90	%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	BB	Predikat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP untuk Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2023 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 serta telah disesuaikan berdasarkan aturan terbaru. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai Visi dan Misi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan Rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam rencana kerja Tahun 2023 merencanakan akan melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib yaitu : Urusan Penunjang Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal. Dari kedua urusan tersebut di breakdown ke dalam 6 Program dan 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP pada tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 4.1.** berikut.

**Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			KETERANGAN		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja			
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											21.571.104.415					21.360.085.363				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				Provinsi Kepulauan Riau dan Luar Kepulauan Riau	100	%						14.426.036.843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%	14.488.392.486		
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia			Kota Tanjungpinang			100	%				237.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100%	237.650.000		
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	1	Dokumen	107.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	57.560.000		
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	1	Dokumen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	70.000.000		

2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	1	Laporan	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	1	Laporan	60.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.000.000	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan		Kota Tanjungpinang									10.759.135.030	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	100%	11.270.967.032	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang					14	Bulan	46	Orang / Bulan	10.236.640.030	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	10.748.472.032	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Dokumen	492.495.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	492.495.000	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPSTP Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang					10	Dokumen	1	Laporan	30.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Buku Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang					12	Dokumen	2	Laporan	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000	

2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik			Kota Tanjungpinang			100	%				44.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	100%	44.220.000	
2.18.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Dokumen	29.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.220.000	
2.18.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang					12	Dokumen	1	Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Disiplin Pegawai			Kota Tanjungpinang			100	%					200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Disiplin Pegawai	100%	200.000.000	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tanjungpinang					37	Unit	1	Paket	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPSTP Prov. Kepri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tanjungpinang					7	Orang	7	Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	50.000.000	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Tanjungpinang			100	%					481.426.572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	481.426.572	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Paket	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Paket	80.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Paket	20.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	3	Dokumen	20.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.000.000	
2.18.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Laporan	30.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kabupaten /Kota dan Luar Kepri					12	Bulan	1	Laporan	251.426.572	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	251.426.572	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>		Kota Tanjungpinang									1.000.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100%	700.523.641	
2.18.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					1	Unit	1	Unit	600.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Mebel yang Diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					2	Unit	2	Unit	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	3	Unit	400.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	350.523.641	

2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Tanjungpinang			100	%				1.518.850.241	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.368.850.241	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Laporan	132.948.192	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	132.948.192	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Laporan	270.554.809	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120.554.809	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Laporan	82.340.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	82.340.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTT dan THL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tanjungpinang					13 & 12	Bulan	1	Laporan	1.033.007.240	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.033.007.240	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan			Kota Tanjungpinang			100	%					184.755.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	100%	184.755.000	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	5	Unit	126.679.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	126.679.000	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	22	Unit	8.076.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	8.076.000	

2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tanjungpinang					12	Bulan	1	Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi			Provinsi Kepulauan Riau	95	%							580.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100%	652.058.448	
							100	%											Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi		100%
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha	Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha			Provinsi Kepulauan Riau	2	Dokumen							400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha	1 Dokumen	452.058.448	
							150	Perusahaan											Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha		200 Perusahaan
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang	2	Dokumen							400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	200.000.000	
							0	Orang													
							100	Orang													
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah			Kota Tanjungpinang	0	Dokumen				150	Kegiatan Usaha	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	200 Kegiatan Usaha	252.058.448		

				Jumlah Pelaksanaan Pemberian Insentif						1	Kegiatan								
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi			Provinsi Kepulauan Riau				3	Dokumen			180.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	2 Dokumen	200.000.000
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Kota Tanjungpinang				1	Dokumen	1	Dokumen	75.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	80.000.000
			Jumlah peserta sosialisasi RUPM				0	Dokumen											
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi		7 Kabupaten /Kota				1	Dokumen	2	Dokumen	460.924.151	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	120.000.000
			Jumlah Dokumen Profil Pengembangan Penanaman Modal					1	Dokumen										
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal				Provinsi Kepulauan Riau	8	%						1.698.408.894	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	10%	2.006.333.687
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri			Provinsi Kepulauan Riau			650	0	Investor			1.698.408.894	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	7200 Investor	2.006.333.687
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Jumlah Jenis Bahan Promosi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi		Kota Tanjungpinang				1	Bahan Promosi	1	Dokumen	300.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	800.000.000
			Jumlah Media Publikasi					1	Media										
			Jumlah Peserta Pelatihan					30	Peserta										
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Jumlah Bussiness Meeting Yang Diikuti/diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		Provinsi Kepulauan Riau				2	Kegiatan	2	Dokumen	1.398.408.894	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	1.206.333.687
			Jumlah Event Promosi Investasi					2	Event										

2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat at atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				Provinsi Kepulauan Riau	84,2	Indeks							3.720.893.638	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat at atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84,88	3.076.378.320
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP																	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Provinsi Kepulauan Riau									870.893.638	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	100%	776.378.320
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjungpinang				1	Kegiatan	1000	Pelaku Usaha	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1000 Pelaku Usaha	400.000.000	
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	7 Kabupaten /Kota				1000	Laporan	1000	Kegiatan Usaha	420.893.638	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	376.378.320	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Provinsi Kepulauan Riau									2.850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	100%	2.300.000.000

2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Tanjungpinang					1	Kegiatan	600	Pelaku Usaha	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	600 Pelaku Usaha	1.100.000.000	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	7 Kabupaten /Kota					600	Laporan	600	Kegiatan Usaha	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	600 Kegiatan Usaha	500.000.000	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	50	Orang	850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	50 Orang	500.000.000	
				Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau			4	Buku													
				Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Informasi Layanan			1	Kegiatan													
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	60	Kegiatan Usaha	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	40 Kegiatan Usaha	200.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM				Provinsi Kepulauan Riau	100	%							716.003.706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100%	835.972.369	

2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM			Provinsi Kepulauan Riau			100	%			716.003.706	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100%	835.972.369	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kabupaten /Kota				40	Perusahaan	9	Kegiatan Usaha	196.003.706	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9 Kegiatan Usaha	195.972.369	
				Taskforce & Asistensi Pengendalian Penanaman Modal						30	Perusahaan								
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Frekuensi Rapat Koordinasi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan				1	Kali	304	Pelaku Usaha	210.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	304 Pelaku Usaha	425.000.000	
				Jumlah dokumen informasi kemitraan antara Perusahaan dengan UMKM						1	Dokumen								
				Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Bimbingan Penanaman Modal						30	Perusahaan								
				Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pembinaan Penanaman Modal						30	Perusahaan								
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	7 Kabupaten /Kota				250	Perusahaan	70	Kegiatan Usaha	310.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	45 Kegiatan Usaha	215.000.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau			Provinsi Kepulauan Riau	100	%					429.761.334	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	100%	300.950.053		

2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik			Provinsi Kepulauan Riau			12	Bulan				429.761.334	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	12 Bulan	300.950.053	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Data/Informasi Terkait Penanaman Modal Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Tanjungpinang					1	Dokumen	1	Dokumen	429.761.334	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	300.950.053	
		Jumlah Konten/Informasi Terkait Penanaman Modal Yang Dipublikasikan Melalui Website							100	Konten										
		Jumlah Pembuatan/Update Aplikasi Data Perizinan Non Perizinan se-Provinsi Kepulauan Riau							1	Aplikasi										
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi Yang Dilaksanakan							30	Orang										

BAB V

PENUTUP

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Renja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan sesuai KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Renja Tahun 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2023. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga

akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Dokumen Renja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan good government di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos

Pembina Utama Muda / IV c

NIP.19690329 199003 1 009

RANCANGAN AKHIR RENJA

Tahun 2023

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.